

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Pada Provinsi Lampung

Putri Permatasari¹, Desi Apriyani², Julia Fitria Rahman³, Sindi⁴, Siti Edeniah⁵, Siti

Nuralfina Putri⁶

¹Universitas Djuanda, c.2210705@unida.ac.id

²Universitas Djuanda, c.2210467@unida.ac.id

³Universitas Djuanda, c.2211080@unida.ac.id

⁴Universitas Djuanda, c.2210087@unida.ac.id

⁵Universitas Djuanda, c.2210013@unida.ac.id

⁶Universitas Djuanda, c.2210189@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Lampung pada tahun 2022-2023, dengan focus pada analisis realisasi belanja dan pendapatan. Dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif, penelitian ini mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran menggunakan teori signaling sebagai kerangka analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Keuangan resmi Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat realisasi belanja mencapai 97% pada tahun 2022 dan 99% pada tahun 2023, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Realisasi pendapatan juga melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan. Transparansi dan akurasi dalam LRA memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dalam perencanaan anggaran dan strategi pengelolaan pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Belanja, Pendapatan, Efisiensi, Efektivitas, Teori Signaling.

PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen utama dalam laporan keuangan pemerintah yang berfungsi untuk menyediakan informasi terkait pelaksanaan anggaran dalam satu periode tertentu. LRA menggambarkan sejauh mana penerimaan, belanja, dan transfer dana telah direalisasikan untuk mendukung program dan kegiatan pemerintah (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Sebagai alat utama dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan ini memainkan peran penting

dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran public (H et al., 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap LRA menjadi relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan teori signaling sebagai kerangka konseptual. Teori ini menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih (manajemen) dapat memberikan sinyal kepada pihak lain melalui laporan keuangan untuk menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan mereka (Spence, 1973). Dalam konteks pemerintahan daerah, kualitas penyajian LRA dapat berfungsi sebagai sinyal positif kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah dan komitmen terhadap tata kelola yang baik (Howe, 1997). Dengan demikian, teori signaling memberikan perspektif yang relevan untuk memahami hubungan antara informasi keuangan dan persepsi public. (Setiawan et al., 2021).

Provinsi Lampung merupakan satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, terdapat beberapa program prioritas yang menunjukkan perbedaan signifikan antara rencana anggaran dan realisasinya, terutama pada sector infrastruktur dan Pendidikan (BPS Lampung, 2023). Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kendala dalam penyajian data keuangan yang dapat memengaruhi kredibilitas informasi yang disajikan dalam LRA (BPK, 2022). Hal ini menjadikan Provinsi Lampung sebagai objek kajian yang relevan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran.

Dalam perspektif teori signaling, LRA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang mencerminkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan yang disusun dengan baik memberikan sinyal positif yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (M.M et al., 2019). Sebaliknya, laporan yang akurat atau tidak memadai dapat menjadi sinyal negative yang berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah. Integrasi antara teori

signaling dan analisis LRA memungkinkan penelitian ini untuk mengeksplorasi implikasi sinyal yang diberikan melalui laporan tersebut.

Analisis LRA juga memainkan peran penting dalam mengukur efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Lampung. Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara rencana anggaran dan realisasi, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (H et al., 2020). Pemahaman ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat dalam mengatasi tantangan pengelolaan anggaran daerah.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana LRA dapat mencerminkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel di Provinsi Lampung. Kajian ini juga menilai hubungan antara penyajian laporan keuangan dan persepsi public terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan temuan yang diperoleh dapat mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Lampung dalam mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana LRA dapat digunakan sebagai sinyal kepercayaan kepada masyarakat, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori riset dasar (*basic research*) dengan pendekatan sebab-akibat (*causal approach*). Pendekatan ini dilakukan melalui pengujian hipotesis, baik yang telah diuji sebelumnya (*hypothesis testing research*). Sementara itu, dari jenis data yang digunakan, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan yang tersedia di situs resmi Provinsi Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Lampung. Objek penelitian adalah laporan keuangan pemerintah

daerah yang mencakup informasi realisasi anggaran selama periode tertentu. Penelitian ini menggunakan data LRA Provinsi Lampung untuk periode tahun 2022-2023. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif, yang bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan hubungan serta pengaruh antar variabel dalam bentuk angka.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berasal dari sumber daya sekunder. Data diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa dokumentasi dari laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung dan studi pustaka terkait. Variabel independent dalam penelitian ini mencakup aspek-aspek anggaran, seperti realisasi belanja, realisasi penerimaan, dan deviasi anggaran, sedangkan variabel dependen adalah tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, dengan focus pada Provinsi Lampung. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Lampung periode 2022-2023
2. Data yang tersedia lengkap dan konsisten selama periode penelitian
3. Tidak terdapat laporan keuangan dengan opini tidak wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan kriteria tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima tahun laporan realisasi anggaran Provinsi Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independent dan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Belanja

Realisasi belanja adalah pelaksanaan pengeluaran anggaran yang telah direncanakan dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program

pemerintah daerah. Anggaran belanja dikelompokkan menjadi belanja operasional, belanja modal serta belanja tidak terduga, di mana masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan (Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006). Realisasi belanja menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana anggaran (H et al., 2020). Tingginya realisasi belanja menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, sementara ketidakcapaian realisasi belanja dapat mencerminkan perencanaan yang kurang matang atau adanya kendala dalam pelaksanaan program (A, 2022).

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan adalah proses pencapaian target penerimaan daerah yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang menjadi sumber utama pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Mardisamo, 2018). Tingkat realisasi pendapatan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta manajemen pengumpulan pendapatan. Pendapatan yang tidak terealisasi sesuai target dapat mengindikasikan adanya kendala dalam system administrasi, pengawasan atau tantangan eksternal seperti perubahan kebijakan ekonomi (Effendi, 2022).

Realisasi Belanja yang Efisien dan Efektif

Realisasi belanja yang efektif dan efisien mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan dengan biaya yang wajar (Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006). Efektivitas belanja dapat dilihat dari kontribusi belanja terhadap pencapaian hasil yang direncanakan, seperti perbaikan layanan public atau pembangunan infrastruktur (H et al., 2020). Sementara itu, efisiensi diukur dari kemampuan pemerintah daerah untuk menghindari pemborosan atau pengeluaran

yang tidak diperlukan (A, 2022). Pemerintah yang mampu merealisasikan belanja secara efektif dan efisien menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.

Realisasi Pendapatan yang Efektif dan Efisien

Realisasi pendapatan yang efektif dan efisien menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan dengan biaya pengumpulan yang minimal dan tetap berorientasi pada optimalisasi hasil (Mardisamo, 2018). Efektivitas pendapatan diukur dari sejauh mana target penerimaan dapat dicapai, sementara efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya yang optimal dalam proses pengumpulan (H et al., 2020). Pemerintah yang berhasil merealisasikan pendapatan secara efisien dan efektif menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan pembangunan (Effendi, 2022).

Tabel 1. Realisasi Anggaran Provinsi Lampung 2022

PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		%thd Anggaran	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	27.132.000	33.329.303	122,84	113.828.252
JUMLAH PENDAPATAN		27.132.000	33.329.303	0,00	113.828.252
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	16.291.946.000	15.902.879.606	97,61	15.302.384.772
Belanja Barang	B.2.2	7.346.493.000	7.246.823.956	98,64	6.636.928.637
Belanja Modal	B.2.3	821.165.000	814.231.491	99,16	488.218.100
JUMLAH BELANJA		24.459.604.000	23.963.935.053	97,97	22.427.531.509

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Lampung (2022)

Tabel 2. Realisasi Anggaran Provinsi Lampung 2023

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Pendapatan Perpajakan					
II. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	B.2.1.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		52.695.000	22.573.957	42,84	112.546.724
III. Pendapatan Hibah					
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		52.695.000	22.573.957	42,84	112.546.724
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1				
Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	9.660.926.000	9.633.780.992	99,72	9.146.670.180
Belanja Barang	B.2.2.1.2	17.331.929.000	17.262.213.022	99,60	15.397.704.681
Belanja Modal	B.2.2.1.3	413.842.000	413.488.500	99,91	284.020.000
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa					
Jumlah Belanja Negara		27.406.697.000	27.309.482.514	99,65	24.828.394.861
C. Pembiayaan					
Jumlah Pembiayaan		-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Provinsi Lampung (2023)

Komparasi Teori Teoritis dan Praktis

No	Konsep Teoritis	Konsep Praktis	Keterangan
1	Realisasi belanja adalah pelaksanaan pengeluaran anggaran yang telah direncanakan dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah daerah	Pada tabel 2 dan 3 di atas, Provinsi Lampung sudah melaksanakan semua anggaran dengan baik dan sekitar 97% untuk tahun 2022 dan 99% untuk tahun 2023.	Sesuai

2	<p>Realisasi pendapatan adalah proses pencapaian target penerimaan daerah yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p>	<p>Pada tabel 2 dan 3, Provinsi Lampung sudah menggunakan pendapatan yang diterimanya dengan baik.</p>	<p>Sesuai</p>
3	<p>Realisasi belanja yang efektif dan efisien mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan dengan biaya yang wajar (Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun, 2006)</p>	<p>Pada tabel 2 dan 3, tercatat bahwa Provinsi Lampung sudah menggunakan biaya belanja sesuai dengan anggaran yang diberikan. Tercatat pada tahun 2022 sekitar 97% sesuai dan pada tahun 2023 sekitar 99%.</p>	<p>Efektif dan Efisien</p>
4	<p>Realisasi pendapatan yang efektif dan efisien menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan dengan biaya pengumpulan yang minimal dan tetap berorientasi pada</p>	<p>Pada tabel 2 dan 3, Provinsi Lampung tercatat mendapatkan pendapatan melebihi anggaran yang diberikan.</p>	<p>Efektif dan Efisien</p>

	optimalisasi hasil (Mardisamo, 2018)		
--	---	--	--

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa realisasi belanja dan pendapatan Provinsi Lampung pada tahun 2022-2023 telah mencapai hasil yang tinggi, dengan tingkat rata-rata realisasi belanja sebesar 97% di tahun 2023. Temuan ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Pada sisi pendapatan, pencapaian target bahkan melampaui rencana, menunjukkan pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal. Berdasarkan teori signaling, penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang transparan dan akurat mampu memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintah daerah. Namun, penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan pendapatan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai demi keberlanjutan pembangunan daerah.

REFERENSI

- A, P. (2022). *Analisis kesenjangan perencanaan dan realisasi anggaran*.
- BPK. (2022). IHPSI (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I) Tahun 2022. *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 94–112.
- Effendi, A. D. (2022). Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 133–146. <http://jurnaldialektika.com/>
- H, H., K, V. P., & I, E. (2020). *Public sector accounting: Accountability and good governance*.
- Howe, J. S. (1997). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *CFA Digest*, 27(1), 5–7. <https://doi.org/10.2469/dig.v27.n1.2>
- M.M, H., A, C., & M, K. (2019). *Transparency and accountability through financial reporting: Evidence from public sector organizations*.
- Mardisamo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, August.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. (2006). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri. Jakarta.

Setiawan, A. B., Anwar, S., & Sriwahyuni, I. (2021). Pengaruh Return on Investment (Roi), Earning Per Share (Eps) Dan Dividen Per Share (Dps) Terhadap Harga Saham. *Jurnal Akunida*, 7(1), 60–71. <https://doi.org/10.30997/jakd.v7i1.4758>

Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. <https://doi.org/10.2307/1882010>